



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD BADAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Gatot Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya
Telp. (024) 6922411 - 6923412 Fax (024) 6921997
kotak Pos 106 Ungaran 50501

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ungaran, 31 Desember 2015

PENGGUNA ANGGARAN

Ir. Whitono, MSi

NIP.19580531 198503 1 007.

DAFTAR ISI

- I Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- II Laporan Realisasi Anggaran SKPD
- III Laporan Operasional SKPD
- IV Neraca Komparatif SKPD

Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akutansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos - Pos Neraca
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas Dana
- 5.2. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2.1. Pendapatan
- 5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup

Lampiran Tambahan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ANAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH/BERKURANG
1.	1	PENDAPATAN			
1.1	2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	44.862.200,00	421.231.207,00
1.1.1	3	Pajak Daerah			
1.1.2	4	Retribusi Daerah			
1.1.3	5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1.1.4	6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	44.862.200,00	421.231.207
1.2	7	DANA PERIMBANGAN		-	
1.2.1	8	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1.2.2	9	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	10	Dana Alokasi Khusus			
1.3	11	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		-	
1.3.1	12	Pendapatan Hibah			
1.3.2	13	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemda Lainnya			
1.3.3	14	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.4	15	Dana Insentif Daerah			
	16	JUMLAH PENDAPATAN	-	44.862.200,00	421.231.207,00
2.	17	BELANJA			
2.1	18	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
2.1.1	19	Belanja Pegawai	14.548.722.000,00	14.127.490.793,00	421.231.207,00
2.1.2	20	Belanja Hibah	14.548.722.000	14.127.490.793,00	421.231.207,00
2.1.3	21	Belanja Bantuan Sosial			-
2.1.4	22	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota			-
2.1.5	23	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa			-

2.1.6	24	Belanja Tidak Terduga			-
2.2	25	BELANJA LANGSUNG	19.277.252.000,00	18.276.038.477,00	1.001.213.523,00
2.2.1	26	Belanja Pegawai	1.588.609.000,00	1.518.746.500,00	69.862.500,00
2.2.2	27	Belanja Barang dan Jasa	16.763.822.000,00	15.846.919.477,00	916.902.523,00
2.2.3	28	Belanja Modal	924.821.000,00	910.372.500,00	14.448.500,00
	29	JUMLAH BELANJA	33.825.974.000,00	32.403.529.270,00	1.422.444.730,00
	30	SURPLUS/DEFISIT	(33.825.974.000,00)	(32.358.667.070,00)	(1.467.306.930,00)
3.	31	PEMBIAYAAN			-
3.1	32	Penerimaan Pembiayaan Daerah		-	-
3.1.1	33	Penggunaan SILPA		-	-
3.1.2	34	Pencairan Dana Cadangan		-	-
3.1.3	35	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan		-	-
3.1.4	36	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir		-	-
3.2	37	Pengeluaran Daerah		-	-
3.2.1	38	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-
3.2.2	39	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
	40	PEMBIAYAAN NETTO		-	-
	41	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(33.825.974.000,00)	(32.358.667.070,00)	(1.467.306.930,00)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SKPD : 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2015

Kode Rekening 1	URAIAN 2	Anggaran Setelah Perubahan 3	Realisasi 2015 4	BERTAMBAH / (KURANG) 5	% 6
4	PENDAPATAN DAERAH	0	44.862.200	(44.862.200)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	44.862.200	(44.862.200)	
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	0	44.862.200	(44.862.200)	
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipsahkan	0	44.862.200	(44.862.200)	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	44.862.200	(44.862.200)	
2.	BELANJA DAERAH	33.825.974.000	32.403.529.270	1.422.444.730	95,79
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.548.722.000	14.127.490.793	421.231.207	97,10
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	14.548.722.000	14.127.490.793	421.231.207	97,10
2.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	6.385.585.000	6.062.987.730	322.597.270	94,95
2.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	8.163.137.000	8.064.503.063	98.633.937	98,79
2.2.	BELANJA LANGSUNG	19.277.252.000	18.276.038.477	1.001.213.523	94,81
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.588.609.000	1.518.746.500	69.862.500	95,60
2.2.1.01.	Honorarium PNS	249.400.000	213.737.500	35.662.500	85,70
2.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.339.209.000	1.305.009.000	34.200.000	97,45
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.763.822.000	15.846.919.477	916.902.523	94,53
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.759.260.000	1.715.844.500	43.415.500	97,53
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.216.000.000	4.163.342.500	52.657.500	98,75
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.276.927.000	1.185.176.587	91.750.413	92,81
2.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	87.498.000	80.742.800	6.755.200	92,28
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	512.030.000	528.617.950	13.412.050	97,53
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	522.302.000	517.486.100	4.815.900	99,08
2.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	475.400.000	420.469.000	54.931.000	88,45

2.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	43.600.000	43.600.000	-	100,00
2.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	138.960.000	135.770.000	3.190.000	97,70
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	904.870.000	869.980.000	34.890.000	96,14
2.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	65.000.000	50.470.000	14.530.000	77,65
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.037.360.000	2.745.154.990	292.205.010	90,38
2.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000	29.625.000	375.000	98,75
2.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	528.740.000	528.537.000	203.000	99,96
2.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000	24.406.000	594.000	97,62
2.2.2.23.	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.924.875.000	2.624.197.050	300.677.950	89,72
2.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	141.500.000	139.000.000	2.500.000	98,23
2.2.2.26.	Belanja Hadiah Barang	44.500.000	44.500.000	-	100,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	924.821.000	910.372.500	14.448.500	98,44
2.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	729.581.000	715.246.500	14.334.500	98,04
2.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan	185.000.000	184.910.000	90.000	99,95
2.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya	10.240.000	10.216.000	24.000	99,77
	SURPLUS/(DEFISIT)	(33.825.974.000)	(32.358.667.070)	(1.467.306.930)	95,66

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALIASASI ANGGARAN ANAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH/BERKURANG
4	1	PENDAPATAN			
4.1	2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	44.862.200,00	421.231.207,00
4.1.1	3	Pajak Daerah	-	-	-
4.1.2	4	Retribusi Daerah	-	-	-
4.1.3	5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
4.1.4	6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	44.862.200	421.231.207
4.2	7	PENDAPATAN TRANSFER			
4.2.1	8	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
4.2.1.1	9	Dana Bagi Hasil Pajak		-	-
4.2.1.2	10	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		-	-
4.2.1.3	11	Dana Alokasi Umum		-	-
4.2.1.4	12	Dana Alokasi Khusus		-	-
4.2.2	13	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA			
4.2.2.1	14	Dana Penyesuaian		-	-
4.2.2.2	15	Dana Insentif Daerah		-	-
4.3	16	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
4.3.1	17	Pendapatan Hibah		-	-
4.3.2	18	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemda Lainnya		-	-
	19	JUMLAH PENDAPATAN	-	44.862.200,00	421.231.207,00
5	20	BELANJA			
5.1	21	BELANJA OPERASI	32.901.153.000,00	31.493.156.770,00	1.407.996.230,00
5.1.1	22	Belanja Pegawai	16.137.331.000	15.646.237.293,00	491.093.707,00
5.1.2	23	Belanja Barang dan Jasa	16.763.822.000	15.846.919.477,00	916.902.523,00
5.1.3	24	Belanja Hibah		-	-
5.1.4	25	Belanja Bantuan Sosial		-	-

5.2	26	BELANJA MODAL	924.821.000,00	910.372.500,00	14.448.500,00
5.2.1	27	Belanja Modal Tanah			-
5.2.2	28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	729.581.000	715.246.500,00	14.334.500,00
5.2.3	29	Belanja Modal Bangunan	185.000.000	184.910.000,00	90.000,00
5.2.4	30	Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Jaringan			-
5.2.5	31	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.240.000	10.216.000,00	24.000,00
5.3	32	BELANJA TIDAK TERDUGA		-	-
5.3.1	33	Belanja Tidak Terduga		-	-
5.4	34	BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA		-	-
5.4.1	35	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab/Kota			-
5.4.2	36	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kab/Kota			-
5.4.3	37	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota			-
5.4.4	38	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa			-
5.4.5	39	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik			-
5.4.6	40	Belanja bantuan Keuangan Kepada Pemda Lain			-
	41	JUMLAH BELANJA	33.825.974.000,00	32.403.529.270,00	1.422.444.730,00
	42	SURPLUS/DEFISIT	(33.825.974.000,00)	(32.358.667.070,00)	(1.467.306.930,00)
6	43	PEMBIAYAAN			-
6.1	44	Penerimaan Pembiayaan Daerah			-
6.1.1	45	Penggunaan SILPA			-
6.1.2	46	Pencairan Dana Cadangan			-
6.1.3	47	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan			-
6.1.4	48	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir			-
6.2	49	Pengeluaran Daerah			-
6.2.1	50	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			-
6.2.2	51	Pembentukan Dana Cadangan			-
	52	PEMBIAYAAN NETTO			-
	53	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(33.825.974.000,00)	(32.358.667.070,00)	(1.467.306.930,00)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL BADAN KETAHANAN PANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

ODE KELASIFIKASI	NO	URAIAN	2014
		KEGIATAN OPERASIONAL	
8	1	PENDAPATAN	
8.1	2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
8.1.1	3	Pendapatan Pajak	-
8.1.2	4	Pendapatan Retribusi Daerah	-
8.1.3	5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
8.1.4	6	Lain-Lain PAD yang Sah	10 240 000,00
	7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	10.240.000,00
8.2	8	PENDAPATAN TRANSFER	
8.2.1	9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN	
8.2.1.1	10	Dana Bagi Hasil Pajak	-
8.2.1.2	11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-
8.2.1.3	12	Dana Alokasi Umum	-
8.2.1.4	13	Dana Alokasi Khusus	-
	14	Kor: Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	-
8.2.2	15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA	
8.2.2.1	16	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	-
8.2.2.2	17	Dana Insentif Daerah	-
	18	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-
	19	Jumlah Pendapatan Transfer	-
8.2.3	20	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	
8.2.3.1	21	Pendapatan Hibah dan Hibah Aset	-
		- Hibah Uang	-
		- Hibah Barang/Jasa	-
8.2.3.2	22	Pendapatan Dana Darurat	-
8.2.3.3	23	Pendapatan Lainnya	-
		- Dana Bagi Hasil dr Pemda Lainnya	-
	24	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-
	25	JUMLAH PENDAPATAN	10.240.000,00
9	26	BEBAN	
9.1	27	BEBAN OPERASIONAL	
9.1.1	28	Beban Pegawai	13 459 738 694,00
9.1.2	29	Beban Barang dan Jasa	15 542 614 576,00
		- Beban Persediaan	9 136 693 580,00
		- Beban Jasa	1 145 016 939,00
		- Beban Pemeliharaan	1 072 004 650,00
		- Beban Perjalanan Dinas	3 655 556 907,00
		- Beban Barang dan Jasa Lainnya	533 342 500,00
9.1.3	30	Beban Bunga	-
9.1.4	31	Beban Subsidi	-
9.1.5	30	Beban Hibah	-
9.1.6	31	Beban Bantuan Sosial	-
9.1.7	32	Beban Penyusutan/Amortisasi	767 389 339,38
		- Beban Penyusutan Aset Tetap	767 389 339,38
		- Beban Amortisasi Aset lainnya	-
9.1.8	33	Beban Lain-Lain	165 095 000,00
		- Beban Penyisihan Piutang	-
		- Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen	-
		- Beban Hibah Aset	-
		- Beban Penghapusan Aset	-
		- Beban Lainnya	165 095 000,00
	34	Jumlah Beban Operasional	29.934.837.609,38
9.2	35	BEBAN TRANSFER	
9.2.1	36	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	-
9.2.2	37	Beban Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak	-
9.2.3	38	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	-
9.2.4	39	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	-
9.2.5	40	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Parpol	-
9.2.6	41	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-
	42	Jumlah Beban Transfer	-
	43	JUMLAH BEBAN	29.934.837.609,38
	44	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL	(29.924.597.609,38)

	45	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	
9.3	46	SURPLUS NON OPERASIONAL	
9 3 1	47	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	-
9 3 2	48	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-
9 3 3	49	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-
9 3 4	50	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-
9 3 5	51	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya	-
	52	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-
	53	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(29.924.597.609,38)
	54	POS LUAR BIASA	
9.4	55	PENDAPATAN LUAR BIASA	
9 4 1	48	Pendapatan Luar Biasa	-
9 4 2	49	Beban Luar Biasa	-
	50	JUMLAH POS LUAR BIASA	-
	51	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	(29.924.597.609,38)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL SKPD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

(dalam rupiah)

NO	Uraian	2015
1	2	4
1	PENDAPATAN	
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
3	Pendapatan Pajak	
4	Pendapatan Retribusi Daerah	
5	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	
6	Lain-Lain PAD yang Sah	44.862.200,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	44.862.200,00
8	PENDAPATAN TRANSFER	
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN	
10	Dana Bagi Hasil Pajak	
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
12	Dana Alokasi Umum	
13	Dana Alokasi Khusus	
14	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan (10 s.d 13)	-
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA	
16	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	
17	Dana Insentif Daerah	
18	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (16 s.d 17)	-
19	Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 18)	-
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	
23	Pendapatan Hibah dan Hibah Aset	
	- Hibah Uang	
	- Hibah Parang/Jasa	
24	Pendapatan Dana Darurat	
25	Pendapatan Lainnya	
	- Dana Bagi Hasil dr Pemda Lainnya	
26	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (23 s.d 25)	-
27	JUMLAH PENDAPATAN (7+19+26)	44.862.200,00
28	BEBAN	
29	BEBAN OPERASIONAL	
30	Beban Pegawai	15.646.237.293,00
31	Beban Barang dan Jasa	16.348.346.267,00
	- Beban Persediaan	10.444.864.040,00
	- Beban Jasa	1.932.547.287,00
	- Beban Pemeliharaan	1.057.154.950,00
	- Beban Perjalanan Dinas	2.745.154.990,00
	- Beban Barang dan Jasa Lainnya	168.625.000,00
32	Beban Bunga	
33	Beban Subsidi	
34	Beban Hibah	
35	Beban Bantuan Sosial	
36	Beban Penyusutan/Amortisasi	787.793.276,89
	- Beban Penyusutan Aset Tetap	705.988.276,89
	- Beban Amortisasi Aset lainnya	81.805.000,00
37	Beban Lain-Lain	
	Beban Penyisihan Piutang	
	Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen	
	Beban Hibah Aset	
	Beban Penghapusan Aset	
	Beban Lain-Lain	
38	Jumlah Beban Operasional (30 s.d 37)	32.782.376.836,89

39	BEBAN TRANSFER	
40	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	
41	Beban Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak	
42	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	
43	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	
44	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Parpol	
45	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
46	Jumlah Beban Transfer (40 s.d 45)	
47	JUMLAH BEBAN (38+46)	32.782.376.836,89
54	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL (27-47)	(32.737.514.636,89)
55	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	
56	SURPLUS NON OPERASIONAL	
57	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	
58	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
59	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	
60	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
61	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya	
62	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (57 s.d 62)	
63	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (54+62)	(32.737.514.636,89)
64	POS LUAR BIASA	
65	PENDAPATAN LUAR BIASA	
66	Pendapatan Luar Biasa	
67	Beban Luar Biasa	
68	JUMLAH POS LUAR BIASA (66-67)	
69	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL (63+68)	(32.737.514.636,89)

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA BADAN KETAHANAN PANGAN
PER 31 DESEMBER 2014**

KODE REKENING	NO	URAIAN	2014
1	1	ASET	
1.1	2	ASET LANCAR	
1.1.1	3	Kas	-
1.1.1.1	4	Kas di Kas Daerah	-
1.1.1.2	5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-
1.1.1.3	6	Kas di Bendahara Penerimaan	-
1.1.1.4	7	Kas di Bendahara BLUD	-
1.1.1.5	9	Setara Kas (Deposito)	-
1.1.2	10	Investasi Jangka Pendek	-
1.1.2.1	11	Investasi Jangka Pendek	-
1.1.3	12	Piutang	-
1.1.3.1	13	Piutang Pajak	-
1.1.3.2	14	Piutang Retribusi	-
1.1.3.3	15	Piutang Lainnya	-
1.1.3.4	16	Penyisihan Piutang	-
1.1.4	17	Belanja Dibayar Dimuka	58.440.000,00
1.1.4.1	18	Belanja Dibayar Dimuka	58.440.000,00
1.1.5	19	Persediaan	1.045.150.440,00
1.1.5.1	20	Persediaan	1.045.150.440,00
	21	JUMLAH ASET LANCAR	1.103.590.440,00
1.2	22	INVESTASI JANGKA PANJANG	
1.2.1	23	Investasi Nonpermanen	-
1.2.1.1	24	Investasi Nonpermanen Lainnya	-
1.2.1.2	25	Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang	-
1.2.2	26	Investasi Permanen	-
1.2.2.1	27	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-
1.2.2.2	28	Investasi Permanen Lainnya	-
	29	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	-
1.3	30	ASET TETAP	
1.3.1	31	Tanah	599.040.000,00
1.3.1.1	32	Tanah	599.040.000,00
1.3.2	33	Peralatan dan Mesin	11.788.897.125,00
1.3.2.1	34	Alat Berat	-
1.3.2.2	35	Alat Angkutan	5.899.540.700,00
1.3.2.3	36	Alat Bengkel	-
1.3.2.4	37	Alat Pertanian dan Peternakan	189.425.000,00
1.3.2.5	38	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.091.670.925,00
1.3.2.6	39	Alat Studio dan Alat Komunikasi	608.260.500,00
1.3.2.7	40	Alat Kedokteran	-
1.3.2.8	41	Alat Laboratorium	-
1.3.2.9	43	Alat Keamanan	-
1.3.3	45	Gedung dan Bangunan	8.546.014.900,00
1.3.3.1	46	Bangunan Gedung	8.363.864.900,00
1.3.3.2	47	Bangunan Monumen	182.150.000,00
1.3.4	48	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	288.495.800,00
1.3.4.1	49	Jalan dan Jembatan	-
1.3.4.2	50	Bangunan Air (Irigasi)	164.387.000,00
1.3.4.3	51	Instalasi	25.900.000,00
1.3.4.4	52	Jaringan	98.208.800,00
1.3.5	53	Aset Tetap Lainnya	94.766.200,00
1.3.5.1	54	Buku dan Perpustakaan	91.285.200,00
1.3.5.2	55	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	3.481.000,00
1.3.5.3	56	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-
1.3.6	57	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
1.3.6.1	58	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
1.3.7	59	Akumulasi Penyusutan	(11.369.687.678,60)
1.3.7.1	60	Akumulasi Penyusutan	(11.369.687.678,60)
	61	JUMLAH ASET TETAP	9.947.526.346,40

1.4	62	DANA CADANGAN		
1.4.1	63	Dana Cadangan		
	64		JUMLAH DANA CADANGAN	-
1.5	65	ASET LAINNYA		
1.5.1	66	Tagihan Penjualan Angsuran/Jangka Panjang		-
1.5.2	67	Tuntutan Ganti Rugi		-
1.5.3	68	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-
1.5.4	69	Aset Tak Berwujud		195.580.000,00
1.5.5	70	Aset Lain-lain		42.689.000,00
1.5.6	71	Akumulasi Amortisasi		-
	72		JUMLAH ASET LAINNYA	238.269.000,00
	73	RK-SKPD KONSOLIDASIAN		
			JUMLAH ASET	11.289.385.786,40
2	74	KEWAJIBAN		
2.1	75	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.1	76	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-
2.1.2	77	Utang Bunga		-
2.1.3	78	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-
2.1.4	79	Pendapatan Dibayar Dimuka		-
2.1.5	80	Utang Beban		-
2.1.6	81	Utang Jangka Pendek Lainnya		-
	82		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-
2.2	83	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2.2.1	84	Utang Dalam Negeri		-
2.2.2	85	Utang Luar Negeri		-
2.2.3	86	Utang Jangka Panjang Lainnya		-
	87		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-
	88		JUMLAH KEWAJIBAN	-
3	89	EKUITAS		
3.1	90	EKUITAS		
		Ekuitas Perubahan SAL		(19.467.883.603,60)
		Pendapatan yang Ditangguhkan		(30.757.269.390,00)
		Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)		-
		Cadangan Piutang		-
		Cadangan Persediaan		58.440.000,00
		Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		1.045.150.440,00
		Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang		-
		Diinvestasikan dalam Aset Tetap		9.947.526.346,40
		Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		238.269.000,00
		Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		-
		Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		-
		Ekuitas Beban Dibayar Dimuka		-
		Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka		-
	91	RK-PPKD KONSOLIDASIAN		30.757.269.390,00
			TOTAL EKUITAS	11.289.385.786,40
	92		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11.289.385.786,40



NERACA
SKPD PROVINSI JAWA TENGAH
Per 31 Desember 2015

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	PER 31 DES 2015 ANAUDITED
1	1	5
1	ASET	
2	ASET LANCAR	
3	Kas	-
4	Kas di Kas Daerah	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-
6	Kas di Bendahara Penerimaan	-
7	Kas di Bendahara BLUD	-
8	Setara Kas (Deposito)	-
11	Investasi Jangka Pendek	-
12	Investasi Jangka Pendek	-
13	Piutang	-
14	Piutang Pajak	-
15	Piutang Retribusi	-
16	Piutang Lainnya	-
17	Penyisihan Piutang	-
18	Belanja Dibayar Dimuka	60.557.100,00
19	Belanja Dibayar Dimuka	60.557.100,00
20	Persediaan	541.606.550,00
21	Persediaan	541.606.550,00
22	JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)	602.163.650,00
23	INVESTASI JANGKA PANJANG	
24	Investasi Nonpermanen	-
25	Investasi Nonpermanen Lainnya	-
26	Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang	-
27	Investasi Permanen	-
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-
29	Investasi Permanen Lainnya	-
30	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (23 s.d 30)	-
31	ASET TETAP	
32	Tanah	599.040.000,00
33	Tanah	599.040.000,00
34	Peralatan dan Mesin	12.504.143.625,00
35	Alat Berat	-
36	Alat Angkutan	6.286.237.200,00
37	Alat Bengkel	-
38	Alat Pertanian dan Peternakan	189.425.000,00
39	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.420.220.925,00
40	Alat Studio dan Alat Komunikasi	608.260.500,00
41	Alat Kedokteran	-
42	Alat Laboratorium	-
43	Alat Keamanan	-
44	Gedung dan Bangunan	8.730.924.900,00
45	Bangunan Gedung	8.363.864.900,00
46	Bangunan Monumen	367.060.000,00
47	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	288.495.800,00
48	Jalan dan Jembatan	-
49	Bangunan Air (Irigasi)	164.387.000,00
50	Instalasi	25.900.000,00
51	Jaringan	98.208.800,00
52	Aset Tetap Lainnya	104.982.200,00
53	Buku dan Perpustakaan	101.501.200,00
54	Barang Bercorak Kesemian/Kebudayaan	3.481.000,00
55	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-
56	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
57	Konstruksi dalam Pengerjaan	-

No	URAIAN	PER 31 DES 2015 ANAUDITED
58	Akumulasi Penyusutan	(12.131.398.155,49)
59	Akumulasi Penyusutan	(12.131.398.155,49)
60	JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 60)	10.096.188.369,51
61	DANA CADANGAN	
62	Dana Cadangan	-
63	JUMLAH DANA CADANGAN (62)	-
64	ASET LAINNYA	78.232.000,00
65	Tagihan Penjualan Angsuran/Jangka Panjang	-
66	Tuntutan Ganti Rugi	-
67	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-
68	Aset Tak Berwujud	195.580.000,00
69	Aset Lain-lain	42.689.000,00
70	Akumulasi Amortisasi	(160.037.000,00)
71	JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)	78.232.000,00
72	JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)	10.776.584.019,51
73	KEWAJIBAN	
74	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-
75	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-
76	Utang Bunga	-
77	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-
78	Pendapatan Dibayar Dimuka	-
79	Utang Beban	-
80	Utang Jangka Pendek Lainnya	-
81	JUMLAH KEWAJIBAN (75 s.d 81)	-
82	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
83	Utang Dalam Negeri	-
84	Utang Luar Negeri	-
85	Utang Jangka Panjang Lainnya	-
86	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (83 s.d 85)	-
87	JUMLAH KEWAJIBAN (81 s.d 86)	-
88	EKUITAS	
89	EKUITAS	(21.582.083.050,49)
	Ekuitas Perubahan SAL	(32.358.667.070,00)
	Pendapatan yang Ditangguhkan	-
	Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)	-
	Cadangan Piutang	60.557.100,00
	Cadangan Persediaan	541.606.550,00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	-
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	10.096.188.369,51
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	78.232.000,00
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-
	Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	-
	Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka	-
	RK-PPKD KONSOLIDASIAN	32.358.667.070,00
91	EKUITAS	10.776.584.019,51
92	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)	10.776.584.019,51



NERACA
BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Per 31 Desember 2015

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	PER 31 DES 2015 ANAUDITED
	1	5
1	ASET	
2	ASET LANCAR	
3	Kas	-
4	Kas di Kas Daerah	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-
6	Kas di Bendahara Penerimaan	-
7	Kas di Bendahara BLUD	-
8	Setara Kas (Deposito)	-
11	Investasi Jangka Pendek	-
12	Investasi Jangka Pendek	-
13	Piutang	-
14	Piutang Pajak	-
15	Piutang Retribusi	-
16	Piutang Lainnya	-
17	Penyisihan Piutang	60.557.100,00
18	Belanja Dibayar Dimuka	60.557.100,00
19	Belanja Dibayar Dimuka	541.606.550,00
20	Persediaan	541.606.550,00
21	Persediaan	602.163.650,00
22	JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)	
23	INVESTASI JANGKA PANJANG	-
24	Investasi Nonpermanen	-
25	Investasi Nonpermanen Lainnya	-
26	Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang	-
27	Investasi Permanen	-
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-
29	Investasi Permanen Lainnya	-
30	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (23 s.d 30)	
31	ASET TETAP	599.040.000,00
32	Tanah	599.040.000,00
33	Tanah	12.504.143.625,00
34	Peralatan dan Mesin	-
35	Alat Berat	6.286.237.200,00
36	Alat Angkutan	-
37	Alat Bengkel	189.425.000,00
38	Alat Pertanian dan Peternakan	5.392.720.925,00
39	Alat Kantor dan Rumah Tangga	635.760.500,00
40	Alat Studio dan Alat Komunikasi	-
41	Alat Kedokteran	-
42	Alat Laboratorium	-
43	Alat Keamanan	8.730.924.900,00
44	Gedung dan Bangunan	8.363.864.900,00
45	Bangunan Gedung	367.060.000,00
46	Bangunan Monumen	288.495.800,00
47	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-
48	Jalan dan Jembatan	164.387.000,00
49	Bangunan Air (Irigasi)	25.900.000,00
50	Instalasi	98.208.800,00
51	Jaringan	104.982.200,00
52	Aset Tetap Lainnya	101.501.200,00
53	Buku dan Perpustakaan	3.481.000,00
54	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-

No	URAIAN	PER 31 DES 2015 ANAUDITED
55	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-
56	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
57	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
58	Akumulasi Penyusutan	(12.131.398.155,49)
59	Akumulasi Penyusutan	(12.131.398.155,49)
60	JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 60)	10.096.188.369,51
61	DANA CADANGAN	-
62	Dana Cadangan	-
63	JUMLAH DANA CADANGAN (62)	-
64	ASET LAINNYA	78.232.000,00
65	Tagihan Penjualan Angsuran/Jangka Panjang	-
66	Tuntutan Ganti Rugi	-
67	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-
68	Aset Tak Berwujud	195.580.000,00
69	Aset Lain-lain	42.689.000,00
70	Akumulasi Amortisasi	(160.037.000,00)
71	JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)	78.232.000,00
72	JUMLAH ASET (22+30+60+63+71)	10.776.584.019,51
73	KEWAJIBAN	-
74	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-
75	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-
76	Utang Bunga	-
77	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-
78	Pendapatan Dibayar Dimuka	-
79	Utang Beban	-
80	Utang Jangka Pendek Lainnya	-
81	JUMLAH KEWAJIBAN (75 s.d 81)	-
82	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-
83	Utang Dalam Negeri	-
84	Utang Luar Negeri	-
85	Utang Jangka Panjang Lainnya	-
86	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (83 s.d 85)	-
87	JUMLAH KEWAJIBAN (81 s.d 86)	-
88	EKUITAS	(21.582.083.050,49)
89	EKUITAS	(32.358.667.070,00)
	Ekuitas Perubahan SAL	-
	Pendapatan yang Ditangguhkan	-
	Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)	60.557.100,00
	Cadangan Piutang	541.606.550,00
	Cadangan Persediaan	-
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	10.096.188.369,51
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	78.232.000,00
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-
	Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	-
	Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka	-
	RK-PPKD KONSOLIDASIAN	32.358.667.070,00
91	EKUITAS	10.776.584.019,51
92	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)	10.776.584.019,51

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN KETAHANAN PANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

NO	URAIAN	2014
1	Ekuitas Awal	15.299.056.666,87
2	Surplus/Defisit-LO	(29.924.597.609,38)
3	RK PPKD	30.757.269.390,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(4.842.342.661,09)
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas	-
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya	-
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang	-
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Persediaan	-
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen	-
4.6	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	
-	- Koreksi Tambah Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa	-
-	- Koreksi Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-
-	- Koreksi Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap	3.006.000,00
-	- Koreksi Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-
-	- Koreksi Tambah Penilaian Aset Tetap	-
-	- Koreksi Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable	-
-	- Koreksi Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap	(3.006.000,00)
-	- Koreksi Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-
-	- Koreksi Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-
-	- Koreksi Kurang Penilaian Aset Tetap	-
4.7	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(4.851.252.661,09)
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	-
4.8	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	
-	- Koreksi Tambah Aset Lainnya dari Belanja Barang dan Jasa	-
-	- Koreksi Tambah Penilaian Aset Lainnya	8.910.000,00
-	- Koreksi Tambah Reklasifikasi antar Aset Lainnya	-
-	- Koreksi Tambah Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
-	- Koreksi Tambah Aset Lainnya dari Mutasi Antar SKPD	-
-	- Koreksi Kurang Penilaian Aset Lainnya	-
-	- Koreksi Kurang Reklasifikasi antar Aset Lainnya	-
-	- Koreksi Kurang Reklasifikasi ke Aset Tetap	-
-	- Koreksi Kurang Aset Lainnya dari Mutasi Antar SKPD	-
4.9	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi	-
4.10	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	
4	Ekuitas Akhir	11.289.385.766,40

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SKPD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015**

NO	URAIAN	2015	2014
1	Ekuitas Awal	11.289.385.786,40	15.299.056.666,87
2	Surplus/Defisit-LO	(32.737.514.636,89)	(29.924.597.609,38)
3	RK-PPKD	32.358.667.070,00	30.757.269.390,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(133.954.200,00)	(4.842.342.661,09)
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas	-	-
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya	-	-
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang	-	-
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Persediaan	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Persediaan	-	-
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen	-	-
4.6	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	3.006.000,00
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	(3.006.000,00)
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap	-	-
4.7	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	(55.722.200,00)	(4.851.252.661,09)
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(55.722.200,00)	(4.851.252.661,09)
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	-	-
4.8	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	-	8.910.000,00
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Lainnya dari Belanja Barang dan Jasa	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Lainnya	-	8.910.000,00
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Lainnya	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Tetap	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Lainnya dari Mutasi Antar SKPD	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Lainnya	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Tetap	-	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Lainnya dari Mutasi Antar SKPD	-	-
4.9	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	(78.232.000,00)	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi	(78.232.000,00)	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi	-	-
4.10	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-
5	Ekuitas Akhir	10.776.584.019,51	11.289.385.786,40

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN KETAHANAN PANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

IO	URAIAN	2014
1	Ekuitas Awal	15.299.056.666,87
2	Surplus/Defisit-LO	(29.924.597.609,38)
3	RK PPKD	30.757.269.390,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(4.842.342.661,09)
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas	-
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya	-
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang	-
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Persediaan	-
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen	-
4.6	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	
-	- Koreksi Tambah Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa	-
-	- Koreksi Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-
-	- Koreksi Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap	3.006.000,00
-	- Koreksi Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-
-	- Koreksi Tambah Penilaian Aset Tetap	-
-	- Koreksi Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable	-
-	- Koreksi Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap	(3.006.000,00)
-	- Koreksi Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-
-	- Koreksi Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-
-	- Koreksi Kurang Penilaian Aset Tetap	-
4.7	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(4.851.252.661,09)
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	-
4.8	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	
-	- Koreksi Tambah Aset Lainnya dari Belanja Barang dan Jasa	-
-	- Koreksi Tambah Penilaian Aset Lainnya	8.910.000,00
-	- Koreksi Tambah Reklasifikasi antar Aset Lainnya	-
-	- Koreksi Tambah Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
-	- Koreksi Tambah Aset Lainnya dari Mutasi Antar SKPD	-
-	- Koreksi Kurang Penilaian Aset Lainnya	-
-	- Koreksi Kurang Reklasifikasi antar Aset Lainnya	-
-	- Koreksi Kurang Reklasifikasi ke Aset Tetap	-
-	- Koreksi Kurang Aset Lainnya dari Mutasi Antar SKPD	-
4.9	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	
-	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi	-
-	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi	-
4.10	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	
4	Ekuitas Akhir	11.289.385.786,40

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab 1 Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No.71 Tahun 2010. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi –transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Pelayanan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum pada Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. BKP merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan dan dipimpin oleh seorang Kepala. BKP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai salah satu lembaga publik, maka BKP dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan ketahanan pangan berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang bersih, demokratis dan efektif. Isu *good governance* menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan tersebut direspon dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan disusun dalam suatu perencanaan yang matang.

Maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana dalam Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan, selama 1 (satu) tahun anggaran yakni Tahun 2015.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda-haraan Negara
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP
7. SE Gubernur Jawa Tengah No. 900/016265 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

- Bab 1 Pendahuluan**
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

 - Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan**
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan

 - Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

 - Bab 4 Kebijakan Akuntansi**
 - 4.1. Entitas Akutansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
 - 4.2. Basis dan Prinsip Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD

 - Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**
 - 5.1. Penjelasan Pos - Pos Neraca
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas Dana
 - 5.2. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2.1. Pendapatan
 - 5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Beban
 - 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

 - Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan**

 - Bab 7 Penutup**
- Lampiran Tambahan**

Bab 2

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Dalam rangka mencapai target pembangunan pembangunan tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -- 2018, yang ditujukan untuk “Meningkatkan Infrastruktur dan Kualitas Pelayanan Dasar Menuju Kemandirian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat”, maka **kebijakan ekonomi daerah** Tahun 2015 diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif.

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010 – 2014 mengalami peningkatan positif. Hal tersebut terlihat pada nilai PDRB tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 692,561 Trilyun, yang meningkat secara signifikan menjadi Rp 925,662 Trilyun pada tahun 2014. Pada tahun 2011 nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 sebesar Rp 656,268 Trilyun, meningkat menjadi Rp 235,298 Trilyun pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk kurun waktu tahun 2011 – 2015 menunjukkan trend positif; berturut-turut pada posisi 5,30%, 5,34%, 5,3%, dan 5,4%.

Inflasi di Jawa Tengah selama tahun 2011 – 2014 cenderung fluktuatif, dengan laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,22% (engan laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,22% (yoy). Sedangkan angka inflasi sampai dengan tahun 2015 sebesar 2,73%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi baik yang bersifat eksternal maupun internal, antara lain disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, regulasi pemerintah dan ekspektasi masyarakat.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2015 yaitu:

a. Pendapatan.

Pada tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 44.862.200,- dan target pendapatan sudah dihapus berdasarkan Hasil rapat Pembahasan Perubahan Anggaran (PAD) tanggal 25 Maret 2013, target PAD dihapus, hal ini dengan pertimbangan penjualan bekatul dan sekam bukan termasuk kedalam Retribusi Daerah, tetapi masuk didalam pendapatan lain-lain. Penerimaan setoran lain-lain dari BPCP (penjualan sekam dan bekatul) tanpa target (Rekening Penjualan Hasil Pertanian) sebesar Rp. 44.862.200,-

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2015

Pada tahun 2015 BKP Prov Jateng mendapatkan anggaran dari APBD sebesar Rp. 33.825.974.000,- terealisasi sebesar Rp. 32.403.529.270,- atau 95,79% terdiri dari:

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 14.548.722.000,- terealisasi sebesar Rp 14.127.490.793,- atau 97,10% yang digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai di BKP Prov Jateng selama tahun 2015.
- Belanja Langsung : Rp 19.277.252.000,- terealisasi sebesar Rp 18.276.038.477,- atau 94,81%
Sisa anggaran belanja langsung tersebut berasal dari efisiensi anggaran, sisa kontrak pengadaan barang/jasa dan belanja hibah peralatan kantin sekolah yang aman bermutu tidak dilaksanakan dikarenakan calon penerima belum berbadan hukum sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Pengadaan barang dan jasa lingkup Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sebanyak 35 buah, terdiri 10 buah paket melalui lelang seleksi umum/ sederhana, 25 buah melalui pengadaan langsung, dan 1 penunjukan langsung. Untuk paket pengadaan melalui lelang sederhana 2 paket tidak dilaksanakan yaitu paket pengadaan peralatan pengolahan pangan lokal dan peralatan kantin sekolah yang aman dan bermutu dikarenakan terkait dengan regulasi hibah (UU No 23 Tahun 2014) dimana calon penerima hibah belum berbadan hukum.

Bab 3

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

Target kinerja APBD 2015 pada Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 1.1.

Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah, Badan Ketahanan Pangan melaksanakan 3 program prioritas pembangunan yaitu : (1) Peningkatan Ketahanan Pangan; (2) Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan; serta (3) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan. Realisasi indikator kinerja program tahun 2015 terhadap target, dengan hasil 7 indikator (100%) tercapai. Indikator yang sesuai target, yaitu : Jumlah regulasi kedaulatan pangan dan Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah. Adapun lima indikator lainnya tercapai melebihi target yaitu : Ketersediaan pangan utama beras; Persentase penguatan cadangan pangan; Persentase penanganan daerah rawan pangan; Skor Pola Pangan Harapan dan Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

Capaian indikator kinerja outcome setiap program dibandingkan dengan target Tahun 2015 dan capaian tahun 2014 sebagai berikut :

- (1). **Peningkatan Ketahanan Pangan**, yaitu: Jumlah regulasi kedaulatan pangan sebanyak 1 regulasi sesuai target, sama dengan tahun sebelumnya terbit 1 regulasi; Ketersediaan pangan utama beras sebesar 6.299.495 ton melebihi target 5.746.958 ton dan meningkat dari 5.732.400 ton; Persentase penguatan cadangan pangan sebesar 130,57% melebihi target 80% dan meningkat dari 100,24%; Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah sebesar 100% sesuai target 100% dan meningkat dari 97,22%; Persentase penanganan daerah rawan pangan 61,29% melebihi target 60% dan meningkat dari 56,25%.
- (2). **Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan** dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA dan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Capaian indikator kinerja program dibandingkan dengan target Tahun 2015 dan capaian tahun 2014 yaitu skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 91,45 melebihi target 91,13 namun turun dari 91,78.
- (3). **Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan** dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan serta Penanganan Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Buah dan Sayur Segar. Realisasi indikator kinerja program dibandingkan dengan target Tahun 2015 dan capaian tahun 2014 yaitu Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 92,42% melebihi target 80% dan meningkat dari 86,60%.

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	42.800.000	42.799.000	100,00	99,99	Efisiensi
2	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (BPCP)	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	-
3	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	323.437.000	258.463.281	100,00	79,91	Efisiensi
4	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (BPCP)	34.200.000	32.146.206	100,00	93,99	Efisiensi
5	KEGIATAN JAMINAN BARANG MILIK DAERAH SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	85.000.000	80.742.800	100,00	94,99	Efisiensi
6	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR/RUMAH DINAS SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	125.000.000	124.960.000	100,00	99,96	Efisiensi
7	KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	225.000.000	224.648.000	100,00	99,84	Efisiensi
8	KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (BPCP)	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00	-
9	KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	200.000.000	196.694.100	100,00	98,34	Efisiensi
10	KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (BPCP)	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00	-
11	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	25.000.000	24.999.500	100,00	99,99	Efisiensi
12	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (BPCP)	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	-
13	KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	95.000.000	95.000.000	100,00	100,00	-
14	KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (BPCP)	10.477.000	10.477.000	100,00	100,00	-

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
 Fungsi :
 Sub Fungsi :
 Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	42.800.000	42.799.000	100,00	99,99	Efisiensi
2	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (BPCP)	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	-
3	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	323.437.000	258.463.281	100,00	79,91	Efisiensi
4	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (BPCP)	34.200.000	32.146.206	100,00	93,99	Efisiensi
5	KEGIATAN JAMINAN BARANG MILIK DAERAH SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	85.000.000	80.742.800	100,00	94,99	Efisiensi
6	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR/RUMAH DINAS SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	125.000.000	124.960.000	100,00	99,96	Efisiensi
7	KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	225.000.000	224.648.000	100,00	99,84	Efisiensi
8	KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (BPCP)	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00	-
9	KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	200.000.000	196.694.100	100,00	98,34	Efisiensi
10	KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (BPCP)	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00	-
11	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	25.000.000	24.999.500	100,00	99,99	Efisiensi
12	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (BPCP)	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	-
13	KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	95.000.000	95.000.000	100,00	100,00	-
14	KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (BPCP)	10.477.000	10.477.000	100,00	100,00	-

15	KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	40.000.000	39.971.000	100,00	99,92	Efisiensi
16	KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (BPCP)	2.580.000	2.580.000	100,00	100,00	-
17	KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	66.000.000	47.320.000	100,00	71,69	Efisiensi
18	KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (BPCP)	5.425.000	5.425.000	100,00	100,00	-
19	KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DI DALAM DAN LUAR DAERAH SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	728.500.000	536.347.699	100,00	73,62	Efisiensi
20	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	698.552.000	653.767.500	100,00	93,58	Efisiensi
21	KEGIATAN PENYEDIAAN BIAYA PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	20.000.000	17.000.000	100,00	85,00	Efisiensi

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
22	KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	400.000.000	386.695.500	100,00	96,67	Efisiensi
23	KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	90.000.000	89.406.000	100,00	99,34	Efisiensi
24	KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (BPCP)	20.000.000	19.987.000	100,00	99,93	Efisiensi
25	KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	540.000.000	526.596.750	100,00	97,51	Efisiensi
26	KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (BPCP)	37.500.000	37.490.200	100,00	99,97	Efisiensi
27	KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00	-
28	KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEUBELAIR SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	20.000.000	19.990.000	100,00	99,95	Efisiensi
29	KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	233.850.000	233.710.000	100,00	99,94	Efisiensi
30	KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (BPCP)	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	-

31	KEGIATAN PEMELIHARAAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	-
32	KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	329.581.000	328.550.000	100,00	99,68	Efisiensi
33	KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (BPCP)	185.000.000	184.910.000	100,00	99,95	-

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
C	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					
34	KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	65.000.000	50.470.000	100,00	77,64	Efisiensi
D	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					
35	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN	30.000.000	29.625.000	100,00	98,75	Efisiensi
E	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN					
36	KEGIATAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	1.759.200.000	1.730.350.550	100,00	98,36	Efisiensi
37	KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN	540.000.000	528.143.879	100,00	97,80	Efisiensi
38	KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM)	997.875.000	931.983.000	100,00	93,39	Efisiensi
39	KEGIATAN PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT	328.950.000	318.452.424	100,00	96,80	Efisiensi
40	KEGIATAN PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN PENANGANAN KERENTANAN PANGAN DI MASYARAKAT	2.833.600.000	2.759.855.954	100,00	97,39	Efisiensi
41	KEGIATAN PENINGKATAN AKSES PANGAN MASYARAKAT DAN PEMANTAUAN HARGA PANGAN STRATEGIS	1.043.400.000	1.028.460.950	100,00	98,56	Efisiensi
42	KEGIATAN PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT	967.550.000	931.287.900	100,00	96,25	Efisiensi

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
F	PROGRAM PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI DAN POLA KONSUMSI PANGAN					
43	KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN PEKERANGAN DAN PENGENALAN KONSUMSI PANGAN B2SA	2.530.025.000	2.487.264.800	100,00	98,30	Efisiensi
44	KEGIATAN PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PENGOLAHAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	758.750.000	729.614.500	100,00	96,16	Efisiensi

G	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN					
45	KEGIATAN PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	843.000.000	606.978.850	100,00	72,00	Efisiensi
46	KEGIATAN PENGEMBANGAN SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR) PADA PRODUK PANGAN SEGAR	849.000.000	848.454.400	100,00	99,93	Efisiensi
H	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL					
47	KEGIATAN PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN	1.000.000.000	926.418.734	100,00	92,64	Efisiensi

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Dalam bagian ini dijelaskan juga faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan (efektivitas dan efisiensi) atau faktor penghambat tidak tercapainya indikator target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (*force majeure*).

A. Permasalahan Atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Hasil analisis dari capaian kinerja termasuk dalam katagori efisien, namun masih muncul adanya beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah antara lain sebagai berikut :

- a. Produksi dan kapasitas produksi pangan semakin terbatas, karena masih adanya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian, menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan, menurunnya produksi akibat perubahan iklim serta bencana alam.
- b. Pengelolaan kelembagaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat belum berkembang secara optimal.
- c. Rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan.
- d. Lemahnya disiplin dan penegakan peraturan untuk menjamin sistem pemasaran yang adil dan bertanggung jawab.
- e. Adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum.
- f. Adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.
- g. Belum diterapkannya secara optimal, praktek keamanan pangan produk segar hasil pertanian. Keamanan pangan dipengaruhi oleh cara budidaya benar dan aman, pasca panen dan retail yang baik serta pendistribusian pangan yang benar sehingga produk pangan yang kita konsumsi akan tepat sasaran dan aman untuk dikonsumsi.
- h. Rendahnya tingkat pengetahuan produsen dan konsumen tentang produk pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi sehingga masih terjadi keracunan makanan.
- i. Rendahnya penguasaan teknologi pangan organik oleh produsen, dan teknologi pangan organik belum menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat karena harganya relatif masih mahal.
- j. Masih rendahnya SDM dalam menangani Pemanfaatan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

B. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

- a. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan.
- b. Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
- c. Penyempurnaan sistem pemantauan produksi pangan dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan.
- d. Mengembangkan program kemandirian pangan pada desa rawan pangan.
- e. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses pangan.
- f. Pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan, keamanan pangan dan preferensi pangan masyarakat.

- g. Koordinasi dan partisipasi aktif dari institusi yang menangani ketahanan pangan dengan instansi terkait untuk pembinaan kepada masyarakat sampai tingkat rumah tangga melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi baik formal maupun non formal kepada masyarakat mengenai pemanfaatan sumberdaya, pengelolaan dan penyediaan pangan yang bergizi, beragam dan aman bagi keluarga.
- h. Diselenggarakannya pelatihan penanganan pasca panen sehingga proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan dapat ditekan sehingga kemampuan penyediaan pangan menjadi meningkat dan harga jual dipasaran menjadi lebih baik. Badan Ketahanan Pangan juga memberikan dukungan stimulan alat kepada kelompok afinitas wanita untuk usaha pangan lokal.
- i. Diselenggarakannya pelatihan pangan olahan berbahan baku ikan, daging dan menggali potensi pangan lokal non beras melalui kegiatan pendidikan kemasyarakatan.
- j. Diperlukan sinkronisasi kegiatan proksi Desa Mandiri Pangan dengan program/kegiatan lain baik yang di danai dari APBD maupun dengan dana APBN lintas sektor sehingga desa mandiri pangan segera tercapai yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Bab 4

Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- Pemerintah pusat;
- Pemerintah daerah;
- Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat,
- Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangan syarat pengelolaan, pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yuridiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis, aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

a. Pendapatan

- 1) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- 2) Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai Pendapatan yang ditangguhkan.
- 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas BLUD. Guna konsistensi dan tertib pencatatan pendapatan maka pada tanggal 31 Desember 2013 agar:
 - Menginventaris saldo kas tunai pada bendahara penerimaan guna menentukan nilai pendapatan dan nilai pendapatan diterima dimuka.
 - Nilai yang telah diidentifikasi menjadi pendapatan agar segera dimasukkan ke rekening BLUD

b. Belanja

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut.
- 3) Untuk Badan Layanan Umum Daerah;
 - Belanja yang sumber dananya berasal dari APBD pengakuannya sama dengan SKPD.
 - Belanja yang sumber dananya dari BLUD diakui pada saat terbitnya SP2D BLUD

c. Piutang

Piutang diakui pada akhir periode ketika akan disusun Neraca sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.

Pada akhir periode akuntansi dibuat daftar umur piutang. Atas dasar daftar umur piutang dibuat cadangan piutang tidak tertagih dengan kebijakan sebagai berikut :

STATUS	LAMA MENUNGGAK	CADANGAN TIDAK TERTAGIH
Lancar	< 1 Tahun	0 %
Kurang Lancar	1 sampai dengan 2 tahun	25 %
Kurang Lancar	Diatas 2 sampai 3 tahun	50 %
Tidak Lancar	Diatas 3 sampai 5 tahun	75 %
Macet	Diatas 5 tahun	100 %

d. Persediaan.

- 1) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
- 2) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi (Stock Opname) yang dituangkan Berita Acara Hasil Stock Opname per 31 Desember 2015. Seluruh SKPD wajib melampirkan Berita Acara tersebut dalam Laporan Keuangan.
- 3) Penilaian persediaan hasil stock opname menggunakan harga pembelian yang terakhir.
- 4) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga /nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
- 5) Apabila ada belanja barang/jasa yang akan dihibahkan masih belum didistribusikan kepada penerima hibah atau masih berada di SKPD maka barang/jasa tersebut diakui dan dicatat sebagai persediaan

e. Aset Tetap

- 1) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
 - c. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas atau diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

- 2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan.
- 3) Kegiatan pengadaan yang menghasilkan satu aset tetap biaya perolehannya terdiri dari realisasi belanja modal dan belanja non modal (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa)
- 4) Aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) biaya perolehan dari masing-masing aset tetap meliputi realisasi belanja modal ditambah prosentase tertentu secara proporsional dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- 5) Suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya memerlukan aset tetap (pengadaan aset tetap dalam rangka menunjang pelaksanaan suatu kegiatan) biaya perolehannya sebesar realisasi belanja modal.
- 6) Aset tetap yang diterima dari pihak ketiga pengakuan dan pencatatannya dilakukan setelah diterima berita acara penyerahan hak kepemilikan aset tersebut.
- 7) Realisasi belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
- 8) Terhadap realisasi belanja modal yang kenyataannya tidak menghasilkan Aset Tetap tidak diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
- 9) Nilai aset tetap pada Neraca Tahun Anggaran 2015 adalah nilai yang telah direkonsiliasi di internal SKPD antara pengurus barang dengan PPK-SKPD dan telah direkonsiliasi dengan DPPAD selaku Pembantu Pengelola Barang.
- 10) Dalam rangka pentahapan pelaksanaan penerapan penyusutan aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan adanya tahun perolehan aset. Sehubungan hal tersebut agar kepala SKPD menginventarisir kembali tahun perolehan seluruh aset yang ada.

Bab 5
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

1.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca

1.1.1. Aset

1.1.1.1. Aset Lancar

1.1.1.1.1. Kas

1.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

1.1.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2015. (DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2015)

NO	Uraian	2015	2014
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

1.1.1.1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2015 belum disetor ke Rekening Kas Daerah. (DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN JASA GIRO DI TAHUN 2015)

NO	Uraian	2015	2014
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

1.1.1.1.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran Kewajiban Pihak Lain

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2015 yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan sudah di SPJ kan dan sudah dimasukkan dalam LRA Tahun Anggaran 2015. (PENJELASAN KEWAJIBAN SECARA SPESIFIK DAN APABILA KEWAJIBAN TELAH LUNAS BUKTI PEMBAYARAN DI TAHUN 2015 DILAMPIRKAN)

NO	Uraian	2015	2014
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

1.1.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

1.1.1.1.1.2.1. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2015. (DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN SISA KAS BENDAHARA DI TAHUN 2015)

NO	URAIAN	2015	2014
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

1.1.1.1.2.2. **Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)**
 Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2015
 belum disetor ke Rekening Kas Daerah. **(DILAMPIRI DENGAN STS PENYETORAN JASA GIRO DI
 TAHUN 2015)**

NO	URAIAN	2015	2014
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

1.1.1.1.2.3. **Kas di Bendahara Penerimaan-BLUD**
 Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan BLUD dari uang titipan
 sian dan pendapatan yang belum disetor ke rekening BLUD per 31 Desember 2015.

NO	URAIAN	2015	2014
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

1.1.1.1.3. **Kas BLUD**
 Kas BLUD adalah saldo kas tunai maupun yang ada di rekening bank yang merupakan selisih antara
 penerimaan dan pengeluaran BLUD tidak termasuk dana yang berasal dari APBD. Dan bagian dari SiLPA
 yang akan digunakan untuk operasional RSUD/RSJD dan tidak disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

NO	URAIAN	2015	2014
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

1.1.1.2. **Piutang**

1.1.1.2.1. **Piutang Pajak (KHUSUS DPPAD)**

Piutang pajak adalah pendapatan pajak yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi
 sampai dengan 31 Desember 2015 belum dibayar oleh wajib pajak. **(DISERTAI PENJELASAN YANG
 SPESIFIK)**

NO	URAIAN	2015	2014
1	PKB		
2	BBNKB		
3	BBNKB		
4	APT		
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Penjelasan Mutasi Piutang Pajak

NO	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1					
2					
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**PIUTANG PAJAK DILAMPIRI DENGAN DATA LENGKAP PENAMBAHAN DAN
 PENGURANGAN PAJAK**

1.1.1.2.2. Piutang Retribusi

Piutang retribusi adalah pendapatan retribusi yang sudah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi sampai dengan 31 Desember 2015 belum dibayar oleh wajib retribusi. Piutang retribusi antara lain piutang retribusi pelayanan kesehatan (piutang pasien dan piutang askes), piutang pemakaian kekayaan daerah dan piutang tempat pelelangan ikan. (DISERTAI PENJELASAN YANG SPESIFIK).

NO	URAIAN	2015	2014
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Penjelasan Mutasi Piutang Retribusi

NO	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Piutang Pasien				
2	Piutang Askes				
3	Piutang TPI				
4	Piutang Jasa Kepelabuhan				
5				
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

* PIUTANG RETRIBUSI DILAMPIRI DENGAN DATA LENGKAP PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN RETRIBUSI

1.1.1.2.3. Piutang Lainnya

Piutang lainnya meliputi piutang selain piutang pajak, piutang retribusi dan bagian lancar tuntutan ganti rugi. Contoh piutang lainnya piutang pendapatan pemanfaatan GOR Jatidiri, piutang hasil penjualan aset kendaraan, piutang penjualan aset tetap peralatan yang tidak terpakai dan piutang tuntutan ganti rugi. (DISERTAI PENJELASAN YANG SPESIFIK).

NO	URAIAN	2015	2014
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

1.1.1.2.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2014 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2014 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS.

NO	URAIAN	2015	2014
1	Asuransi BMD	60.593.100	58.440.000,00
2	Asuransi Pegawai Non PNS		
	Jumlah	60.593.100	58.440.000,00

1.1.1.2.5. Cadangan Piutang Tidak Tertagih

Cadangan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD dan dimungkinkan tidak dapat tertagih per 31 Desember 2015. Cadangan piutang tidak tertagih antara lain cadangan piutang tidak tertagih pajak, retribusi pelayanan kesehatan (pasien dan askes), retribusi tempat pelelangan ikan. (DISERTAI PENJELASAN YANG SPESIFIK).

Kebijakan pencadangan piutang tidak tertagih

STATUS	LAMA MENUNGGAK	% CADANGAN TIDAK TERTAGIH
Lancar	< 1 Tahun	0%
Kurang lancar	1 sampai dengan 2 tahun	25%
Kurang lancar	Diatas 2 sampai 3 tahun	50%

Tidak lancar	Diatas 3 sampai 5 tahun	75%
Macet	Diatas 5 tahun	100%

Lama Menunggak	2015		2014
	Piutang	Cadangan	
< 1 Tahun			
1 sampai dengan 2 tahun			
Diatas 2 sampai 3 tahun			
Diatas 3 sampai 5 tahun			
Diatas 5 tahun			
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

1.1.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2015, dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

1.1.1.1.3.1. Persediaan Bahan Pakai Habis

NO	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.934	0	25.627.800
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3	0	109.500
3	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	86	0	1.580.750
	Jumlah			27.318.050

1.1.1.1.3.2. Persediaan Bahan/Material

NO	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
1	Belanja Bahan Pangan (Dapur Umum Bencana Alam/Cadangan Pangan)	87.347	0	505.608.500
	Jumlah			505.608.500

1.1.1.1.3.3. Persediaan Cetak

NO	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
1	Belanja Cetak	1.719	0	8.680.000
	Jumlah			8.680.000

1.1.1.1.3.4. Persediaan Pakaian Dinas

NO	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
1				
2				
	Jumlah	NIHIL		NIHIL

1.1.1.1.3.5. Persediaan Makanan dan Minuman

NO	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
1				
2				
	Jumlah	NIHIL		NIHIL

1.1.1.1.3.6. Persediaan Hibah Yang Belum Diserahkan Kepada Pihak Lain

NO	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
1				
2				
	Jumlah	NIHIL		NIHIL

Penyerahan dari

NO	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Nilai Persediaan
1	Obat-obatan			
2	Makanan dan minuman			
3			
	Jumlah	NIHIL		NIHIL

1.1.1.2. Investasi Jangka Panjang

1.1.1.2.1. Investasi Nonpermanen

Investasi nonpermanen merupakan saldo dana bergulir yang dikelola oleh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :

No	Uraian	2015	Penambahan	Pengurangan	2014
1	Biro Perekonomian - UMKM - Pembangunan Gd. BPR-BKK				
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dana Bergulir Sapi Kereman				
3	Dinas Koperasi dan UKM Dana Bergulir UKM				
4	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Dana Bergulir Penempatan TK ke LN				
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dana Bergulir IKM				
6	Dinas Kehutanan Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat				
7	Badan Ketahanan Pangan Dana Bergulir Kelompok Tani (Gerbang Mapan)				
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

1.1.1.2.2. Investasi Nonpermanen-Diragukan Tertagih

Investasi Nonpermanen-Diragukan Tertagih merupakan saldo piutang yang dimungkinkan tidak tertagih yang dikelola oleh SKPD. Kebijakan diragukan tertagih sesuai dengan kebijakan piutang tidak tertagih.

Lama Menunggak	2015		2014
	Investasi Nonpermanen	Diragukan Tertagih	
< 1 Tahun			
1 sampai dengan 2 tahun			

Diatas 2 sampai 3 tahun			
Diatas 3 sampai 5 tahun			
Diatas 5 tahun			
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

1.1.1.3. Aset Tetap

NO	URAIAN	2015	2014
1	Tanah	599.040.000	599.040.000
2	Peralatan dan Mesin	12.504.143.625	11.788.897.125
3	Gedung dan Bangunan	8.730.924.900	8.546.014.900
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	288.495.800	288.495.800
5	Aset Tetap Lainnya	104.982.200	94.766.200
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	Jumlah	22.227.586.525	21.317.214.025

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Penambahan	2015
Belanja Modal	910.372.500
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi	-
Koreksi	-
Jumlah	910.372.500
Pengurangan	
Ekstrakontable	-
Reklasifikasi	-
Hibah	-
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Jumlah	NIHIL

Keterangan mutasi tambah aset tetap tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2014.
- ✓ Belanja Barang / Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2014 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2014.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset tetap merupakan nilai perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap

Mutasi tambah aset tetap tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- ✓ Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud
- ✓ Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2014.
- ✓ Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

1.1.1.3.1. Tanah

No	Uraian	2015	2014
1	Tanah	599.040.000	599.040.000
	Jumlah	599.040.000	599.040.000

1.1.1.3.2. Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2015	2014
1	Alat Besar	-	-
2	Alat Angkutan	6.286.237.200	5.899.540.700
3	Alat Bengkel	-	-
4	Alat Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur	-	-
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.392.720.925	5.091.670.925
6	Alat Studio dan Komunikasi	635.760.500	608.260.500
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
8	Alat Laboratorium	-	-
9	Alat Keamanan	-	-
10	Alat Alat Pertanian/Peternakan	189.425.000	189.425.000
	Jumlah	12.504.143.625	11.788.897.125

1.1.1.3.3. Gedung dan Bangunan

No	Uraian	2015	2014
1	Gedung	8.363.864.900	8.363.864.900
2	Bangunan / Monumen	367.060.000	182.150.000
	Jumlah	8.730.924.900	8.545.014.900

1.1.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

No	Uraian	2015	2014
1	Jalan dan Jembatan	-	-
2	Bangunan Air (Irigasi)	164.387.000	164.387.000
3	Instalasi	25.900.000	25.900.000
4	Jaringan	98.208.800	98.208.800
	Jumlah	288.495.800	288.495.800

1.1.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	2015	2014
1	Buku Perpustakaan	101.501.200	91.285.200
2	Barang Bercorak Seni dan Budaya	3.481.000	3.481.000
3	Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-
	Jumlah	104.982.200	94.766.200

1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	2015	2014
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Jenis KDP	Lokasi	No Kontrak	Nilai Kontrak	Masa Pelaksanaan	Realisasi	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
						NIHIL	NIHIL

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut kegiatan yang belum diselesaikan

Kolom 2 diisi dengan jenis pembangunan yang mengalami KDP

Kolom 3 diisi dengan lokasi terjadinya KDP

Kolom 4 diisi dengan nomor kontrak KDP

Kolom 5 diisi dengan nilai kontrak KDP

Kolom 6 diisi dengan masa pelaksanaan pembangunan (sesuai dalam kontrak)

Kolom 7 diisi dengan realisasi KDP

Kolom 8 diisi dengan prosentase pembangunan.

Disamping itu pada kolom 3 juga diisi informasi mengenai nilai kontrak, tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.

4. Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	2015	2014
1	Alat Besar	-	-
2	Alat Angkutan	5.276.119.287,50	5.092.276.237,50
3	Alat Bengkel & Ukur	-	-
4	Alat Pertanian	189.425.000	189.425.000
5	Alat Kantor & RT	4.832.551.075	4.518.085.625
6	Alat Studio dan Komunikasi	592.043.500	572.980.000
7	Alat Kedokteran	-	-
8	Alat Laboratorium	-	-
9	Alat Keamanan	-	-
10	Gedung	1.127.708.844,67	959.775.354,44
11	Monumen	21.913.200	14.572.000
12	Instalasi	4.316.666,67	3.453.333,33
13	Jaringan	21.596.181,67	19.120.128,33
14	Bangunan Air Irigasi	65.724.400	55.722.200
	Jumlah	12.131.398.155,51	11.425.409.878,60

5. Aset Lainnya

5.1. Aset Dikerjasamakan

No	Uraian	2015	2014
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

5.2. Barang Tidak Berwujud

No	Uraian	2015	2014
1	Aset Tak Berwujud	195.580.000	195.580.000
2			
	Jumlah	195.580.000	195.580.000

1.1.5.3. Barang Rusak Berat

No	Uraian	2015	2014
1	Aset Tetap Rusak Berat dan Diusulkan Penghapusan	42,689,000	42,689,000
	Jumlah	42,689,000	42,689,000

- BARANG RUSAK BERAT YANG TELAH DIHAPUSKAN AGAR MELAMPIRKAN BERITA ACARA PENGHAPUSANNYA

1.2. Kewajiban

1.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

1.2.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

1.2.1.2. Utang Jangka Pendek Lainnya

1.2.1.2.1. Utang Jasa Pelayanan Kepada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah

No	Uraian	2015	2014
1	Dinas Kesehatan		
2	RS. Dr. Mowardi Surakarta		
3	RS. Dr. Margono Sukarjo		
4	RS. Tugurejo Semarang		
5	RSJ. Dr. Amino Gondohutomo		
6	RSJD. Surakarta		
7	RSJD. Soejarwadi Klaten		
8	RSUD Kelet Donorejo Jepara		
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Hak Dinas	Sudah Dibayar TA. 2015	Kurang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS KESEHATAN						
	a. BKPM Semarang						
	1) Kekurangan 2014						
	2) TA. 2015						
	b. BKPM Pati						
	1) Kekurangan 2014						
	2) TA. 2015						
	c. BKPM Klaten						
	1) Kekurangan 2014						
	2) TA. 2015						
	d. BKPM Magelang						
	1) Kekurangan 2014						
	2) TA. 2015						
	e. Balapkes Semarang						
	1) Kekurangan 2014						
	2) TA. 2015						
	f. BKIM Semarang						
	1) Kekurangan 2014						
	2) TA. 2015						
2	RSUD Moewardi						
	1) Kekurangan 2014						

	2) TA. 2015						
3	RSUD Margono						
	1) Kekurangan 2014						
	2) TA. 2015						
4	RSUD Tugurejo						
	1) Kekurangan 2014						
	2) TA. 2015						
5	RSUD Kelet/Donorejo						
	1) Kekurangan 2014						
	2) TA. 2015						
6	RSJ. Dr. Amino Gondohutomo						
	1) Kekurangan 2014						
	2) TA. 2015						
7	RSJ Surakarta						
	1) Kekurangan 2014						
	2) TA. 2015						
8	RSJ Klaten						
	1) Kekurangan 2014						
	2) TA. 2015						
				NIHIL		NIHIL	

Catatan : Utang Jasa Pelayanan diberi penjelasan pelunasan atas utang tersebut pada Tahun 2016

1.1.2.1.2.2. Utang bagi hasil pajak/retribusi kepada Kabupaten/Kota (DPPAD)

No	Uraian	2015	2014
1	Pajak Kendaraan Bermotor		
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan APT		
5	Retribusi Metrologi		
6	TPI ke Puskud		
7	Kapal Cepat Kartini I Kepada Kabupaten Jepara		
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

PERHITUNGAN BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Hak Dinas	Sudah Dibayar TA. 2015	Kurang Dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bagi Hasil -PKB						
	1) Kekurangan 2014						
	2) TA. 2015						
2	Bagi Hasil -BBNKB						
	1) Kekurangan 2014						
	2) TA. 2015						
3	Bagi Hasil -PBBKB						
	1) Kekurangan 2014						
	2) TA. 2015						
4	BH-Pajak APT						

	1) Kekurangan 2014					
	2) TA. 2015					
5	Tera/Tera Ulang					
	1) Kekurangan 2014					
	2) TA. 2015					
6	TPI Kepada Puskud					
	1) Kekurangan 2014					
	2) TA. 2015					
7	Kapal Cepat Kartini					
	1) Kekurangan 2014					
	2) TA. 2015					
		NIHIL	NIHIL			NIHIL

1.1.2.1.2.3. Utang Lain-Lain

No	Uraian	2015	2014
1	Utang Belanja		
2	Utang Kepada Pihak Ketiga		
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

1.1.2.1.2.4. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan penerimaan yang sesungguhnya belum menjadi hak SKPD pada periode bersangkutan, tetapi pembayarannya telah terlebih dahulu diterima oleh SKPD pada Tahun 2015.

No	Uraian	2015	2014
1			
2			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

1.1.3. EKUITAS

No	Uraian	2015	2014
1	Ekuitas Perubahan SAL	(32.358.667.070)	(30.757.269.390)
2	Pendapatan yang ditangguhkan	-	-
3	Kas di Bendahara BLUD hutang pihak ketiga (non SiLPA)	-	-
4	Cadangan Piutang	60.557.100	58.440.000,00
5	Cadangan Persediaan	541.606.550	1.045.150.440
6	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek	-	-
7	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	10.096.188.369,51	9.947.526.346,40
8	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	78.232.000	229.359.000
9	Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	-	-
10	Ekuitas Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Jumlah	10.776.584.019,51	11.289.385.786,40

1.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

1.2.1. Pendapatan

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan yang diterima selama TA. 2015 dan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu tetapi sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah tidak ikut diperhitungkan dalam penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2015 dan diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

(SEMUA OBJEK PENDAPATAN YANG TIDAK MENCAPAI TARGET DIJELASKAN SECARA RINCI)

1.2.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD)

No	Uraian	2015	2014
1	PKB		
2	BBNKB		
3	PBBKB		
4	PAP		
5	Pajak Rokok		
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

1.2.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	2015	2014
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan		
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		
3	Retribusi Pelayanan Tera & Tera Ulang		
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan		
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
6	Retribusi Tempat Pelelangan		
7	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa		
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
9	Retribusi Ijin Trayek		
10	Retribusi Ijin Usaha Perkebunan		
11	Retribusi Ijin Usaha Perikanan		
12	Retribusi Ijin Menpekerjakan Tenaga Asing (IMTA)		
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

1.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Uraian	2015	2014
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		
2	Jasa Giro		
3	Bunga		
4	Tuntutan ganti Kerugian Daerah		
5	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
6	Denda Pajak		
7	Denda Retribusi		
8	Pendapatan dari Pengembalian		
9	Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
10	Penerimaan dr Penyelenggaraan Diklat		
11	Pendapatan BLUD		
12	Penerimaan Lain-Lain	44.862.200	10.240.000
	Jumlah	44.862.200	10.240.000

1.2.2. BELANJA

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015. (Semua Objek Belanja Yang Tidak Dapat Terealisasi < 95% Dijelaskan Secara Rinci)

1.2.2.1. BELANJA OPERASI

1.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Merupakan belanja pegawai baik yang ada pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

No	Uraian	2015	2014
I.	Belanja Tidak Langsung	14.127.490.793	11.357.561.694
II.	Belanja Langsung	18.276.038.477	19.409.947.696
	Honorarium PNS	213.737.500	538.830.000

	Honorarium Non PNS	1.305.009.000	1.553.447.000
	Uang Lembur	8.064.503.063	5.507.267.700
	Belanja Pegawai BLUD	-	-
	Belanja Jasa Non PNS	499.100.000	345.650.000
	Jumlah	42.485.878.833	38.712.704.090

1.2.2.1.2. Belanja Barang

No	Uraian	2015	2014
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1.715.844.500	906.339.050
2	Belanja Bahan/Material	4.163.342.500	2.301.280.100
3	Belanja Jasa Kantor	1.185.176.587	1.111.016.939
4	Belanja Premi Asuransi	80.742.800	77.920.000
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	528.617.950	410.073.650
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	517.486.100	521.971.000
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	420.469.000	432.612.500
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	43.600.000	53.000.000
9	Belanja Sewa Alat Berat	-	-
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	135.770.000	28.250.000
11	Belanja Makanan dan Minuman	869.980.000	782.765.000
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	50.470.000	52.740.000
13	Belanja Pakaian Kerja	-	-
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	-	36.684.000
15	Belanja Perjalanan Dinas	2.745.154.990	3.655.556.907
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-
17	Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	29.625.000	49.545.000
18	Belanja Pemeliharaan	528.537.000	661.931.000
19	Belanja Jasa Konsultasi	24.406.000	-
20	Belanja Barang & Jasa BLUD	-	-
21	Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.624.197.050	3.324.805.250
22	Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	139.000.000	87.050.000
23	Belanja Hadiah Barang	44.500.000	-
	Jumlah	15.846.919.477	14.493.540.396

1.2.2.1.3. Belanja Modal

1.2.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

No	Uraian	2015	2014
	BM. Pengadaan Tanah	0	0

1.2.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2015	2014
1	BM. Pengadaan Alat-alat Berat	-	-
2	BM. Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat bermotor	386.696.500	663.178.000
3	BM. Pengadaan Alat-alat Bengkel dan Ukur	-	-
4	BM. Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	-	-
5	BM. Pengadaan Alat-alat Kantor dan RT	96.150.000	71.450.000
6	BM. Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi	-	2.950.000
7	BM. Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	-
8	BM. Pengadaan Alat-alat Laboratorium	-	-
9	BM. Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Kemampuan	-	-

	Honorarium Non PNS	1.305.009.000	1.553.447.000
	Uang Lembur	8.064.503.063	5.507.267.700
	Belanja Pegawai BLUD	-	-
	Belanja Jasa Non PNS	499.100.000	345.650.000
	Jumlah	42.485.878.833	38.712.704.090

1.2.2.1.2. Belanja Barang

No	Uraian	2015	2014
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1.715.844.500	906.339.050
2	Belanja Bahan/Material	4.163.342.500	2.301.280.100
3	Belanja Jasa Kantor	1.185.176.587	1.111.016.939
4	Belanja Premi Asuransi	80.742.800	77.920.000
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	528.617.950	410.073.650
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	517.486.100	521.971.000
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	420.469.000	432.612.500
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	43.600.000	53.000.000
9	Belanja Sewa Alat Berat	-	-
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	135.770.000	28.250.000
11	Belanja Makanan dan Minuman	869.980.000	782.765.000
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	50.470.000	52.740.000
13	Belanja Pakaian Kerja	-	-
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	-	36.684.000
15	Belanja Perjalanan Dinas	2.745.154.990	3.655.556.907
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-
17	Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	29.625.000	49.545.000
18	Belanja Pemeliharaan	528.537.000	661.931.000
19	Belanja Jasa Konsultasi	24.406.000	-
20	Belanja Barang & Jasa BLUD	-	-
21	Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.624.197.050	3.324.805.250
22	Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	139.000.000	87.050.000
23	Belanja Hadiah Barang	44.500.000	-
	Jumlah	15.846.919.477	14.493.540.396

1.2.2.1.3. Belanja Modal

1.2.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

No	Uraian	2015	2014
	BM. Pengadaan Tanah	0	0

1.2.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2015	2014
1	BM. Pengadaan Alat-alat Berat	-	-
2	BM. Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat bermotor	386.696.500	663.178.000
3	BM. Pengadaan Alat-alat Bengkel dan Ukur	-	-
4	BM. Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	-	-
5	BM. Pengadaan Alat-alat Kantor dan RT	96.150.000	71.450.000
6	BM. Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi	-	2.950.000
7	BM. Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	-
8	BM. Pengadaan Alat-alat Laboratorium	-	-
9	BM. Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	-	-

No	Uraian	2015	2014
10	Belanja Modal Pengadaan Komputer	131.600.000	137.369.500
11	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	100.800.000	-
	Jumlah	715.246.500	874.947.500

1.2.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	2015	2014
1	BM. Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	184.910.000	79.822.000
	Jumlah	184.910.000	79.822.000

1.2.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	2015	2014
1	BM. Pengadaan Konstruksi Jalan dan Jembatan	-	-
2	BM. Pengadaan Konstruksi Bangunan Air	-	-
3	BM. Pengadaan Instalasi dan Jaringan	-	-
	Jumlah	Nihil	Nihil

1.2.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	2015	2014
1	BM. Pengadaan Pengadaan Buku/Perpustakaan	10.216.000	20.936.800
2	BM. Pengadaan Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan.	-	-
3	BM. Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	-	-
	Jumlah	10.216.000	20.936.800

1.2.2.1.3.6. Belanja Modal BLUD

BELANJA MODAL BLUD DIRINCI SESUAI KATEGORI ASET TETAP APBD

Catatan :

Untuk mengisi rincian pendapatan maupun belanja dapat dilihat di SIPKD dengan langkah :

- Masuk pada modul pertanggungjawaban
- Pilih menu Cetak
- Pilih LRA
- Menu default diganti akhir
- Level cetak LRA per obyek

1.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

1.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2015.

1.3.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD)

No	Uraian	2015	2014
1	PKB		
2	BBNKB		
3	PBBKB		
4	PAP		
5	Pajak Rokok		
	Jumlah	0	0

1.3.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	2015	2014
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan		
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		
3	Retribusi Pelayanan Tera & Tera Ulang		
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan		
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
6	Retribusi Tempat Pelelangan		
7	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa		
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
9	Retribusi Ijin Trayek		
10	Retribusi Ijin Usaha Perkebunan		
11	Retribusi Ijin Usaha Perikanan		
12	Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)		
	Jumlah	0	0

1.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Uraian	2015	2014
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		
2	Jasa Giro		
3	Bunga		
4	Tuntutan ganti Kerugian Daerah		
5	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
6	Denda Pajak		
7	Denda Retribusi		
8	Pendapatan dari Pengembalian		
9	Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
10	Penerimaan dr Penyelenggaraan Diklat		
11	Pendapatan BLUD		
12	Penerimaan Lain-Lain	44.862.200	10.240.000
	Jumlah	44.862.200	10.240.000

1.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah ditertibkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima.

1.3.2.1. BEBAN OPERASIONAL

1.3.2.1.1. Beban Pegawai

No	Uraian	2015	2014
1	Belanja Tidak Langsung	14.127.490.793	11.357.561.694
2	Belanja Langsung	18.276.038.477	19.409.947.696
	Jumlah	32.403.529.270	30.767.509.390

1.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

No	Uraian	2015	2014
1	Beban Persediaan	10.444.864.040,00	9.136.693.580
2	Beban Jasa	1.932.547.287,00	1.145.016.939
3	Beban Pemeliharaan	1.057.154.950,00	1.072.004.650
4	Beban Perjalanan Dinas	2.745.154.990,00	3.655.556.907
5	Beban Barang dan Jasa Lainnya	168.625.000,00	533.342.500
	Jumlah	16.348.346.267,00	15.542.614.576,00

1.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

No	Uraian	2015	2014
1	Beban Penyusutan Aset Tetap	12.131.398.155,51	11.425.409.878,60
2	Beban Amortisasi Aset Lainnya	117.348.000,00	78.232.000,00
	Jumlah	12.248.746.156	11.503.641.879

1.3.2.1.4. Beban Lain-Lain

No	Uraian	2015	2014
1	Beban Penyisihan Piutang	-	-
2	Beban Hibah Aset	-	-
3	Beban Penghapusan Aset	-	-
4	Beban Lainnya	168.625.000	165.095.000
	Jumlah	168.625.000	165.095.000

1.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2015 ekuitas awal sebesar 11.289.385.784,60 terjadi surplus/deficit-LO sebesar (32.737.514.636,89) pada periode bersangkutan. Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap menambah sebesar 27.500.000,00 dan Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap mengurangi sebesar (27.500.000,00). Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan sebesar (55.722.200,00). Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi sejumlah (78.232.000,00).

Bab 6 Penjelasan Informasi Non Keuangan

Informasi non keuangan SKPD antara lain:

Gambaran Umum Organisasi

Tugas pokok BKP sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 adalah membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, BKP sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
3. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten / kota;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
5. pelaksanaan kesekretariatan badan;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 5 (lima) Unit Kerja Eselon III. Setiap eselon III didukung oleh 2 atau 3 eselon IV.

Tugas pokok dan fungsi setiap Unit Kerja Eselon III dan IV adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) subag yaitu: Sub bagian Program, Sub bagian Keuangan serta Sub bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. **Sub bagian Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi dan penyusunan program, dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan.
- b. **Sub bagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan.
- c. **Sub bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan.

2. Bidang Ketersediaan Pangan

Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan, dan kemandirian pangan. Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kemandirian pangan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan Pangan membawahi Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan dan Sub Bidang Kemandirian Pangan:

- a. **Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan, meliputi: indentifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan, koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab, pembinaan cadangan pangan di masyarakat, pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi, koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
- b. **Sub Bidang Kemandirian Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kemandirian pangan, meliputi : koordinasi penanganan kerawanan pangan provinsi, pengendalian kerawanan pangan wilayah provinsi, identifikasi lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat provinsi, pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat provinsi, pengembangan *trust fund* provinsi.

3. Bidang Distribusi Pangan

Bidang distribusi pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang distribusi dan pemasaran pangan, dan analisis akses dan harga pangan. Bidang Distribusi Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan distribusi dan pemasaran pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan analisis akses dan harga pangan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi Pangan, membawahkan Sub bidang Distribusi Dan Pemasaran Pangan; dan Sub bidang Analisis Akses Dan Harga Pangan:

- a. **Sub bidang Distribusi dan Pemasaran Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang distribusi dan pemasaran pangan, meliputi: identifikasi infrastruktur distribusi pangan, pengembangan infrastruktur distribusi pangan dan koordinasi pengembangan infrastruktur pangan provinsi.
- b. **Sub bidang Analisis Akses dan Harga Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang analisis akses dan harga pangan, meliputi: koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat, informasi harga di provinsi, dan pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi.

4. Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan

Bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konsumsi pangan, dan pengolahan dan penganekaragaman pangan. Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan konsumsi pangan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengolahan dan penganekaragaman pangan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan Sub Bidang Konsumsi Pangan serta Sub Bidang Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan.

- a. **Sub Bidang Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konsumsi pangan, meliputi : identifikasi pangan pokok masyarakat, koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan.
- b. **Sub Bidang Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan dan penganekaragaman pangan, meliputi: identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat, pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal.

5. Bidang Keamanan Pangan

Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan mutu hasil pangan, dan sertifikasi dan pelabelan produk pangan. Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pembinaan mutu hasil pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan produk pangan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Sub bidang Pembinaan Mutu Hasil Pangan; dan Sub bidang Sertifikasi Dan Pelabelan Produk Pangan.

- a. **Sub Bidang Pembinaan Mutu Hasil Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan mutu hasil pangan, meliputi: pembinaan mutu dan keamanan pangan pabrikan di provinsi, pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi.
- b. **Sub Bidang Sertifikasi dan Pelabelan Produk Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sertifikasi dan pelabelan produk pangan, meliputi : pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga, pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi, pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah provinsi, pembinaan penerapan standar batas minimal residu di wilayah provinsi (BMR) dan monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota .

6. Balai Pengembangan Cadangan Pangan

Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Badan Bidang Cadangan Pangan. Balai Pengembangan Cadangan Pangan, mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusi, serta pengelolaan cadangan pangan.
- b. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan cadangan pangan;
- c. Penyusunan bahan dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan cadangan pangan, pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan cadangan pangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan cadangan pangan;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan Balai;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balai Pengembangan Cadangan Pangan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengadaan Cadangan Pangan, Seksi Distribusi Cadangan Pangan, Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 dan disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- c. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Rencana Strategis

Renstra Badan Ketahanan Pangan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang memuat prioritas program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi Badan Ketahanan Pangan 2013 – 2018 dilaksanakan 3 misi disertai tujuan dan sasarnya.

1. Visi

"Lembaga yang Handal dan Profesional dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumberdaya Lokal Menuju Kemandirian Jawa Tengah "

2. Misi

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Badan Ketahanan Pangan telah merumuskan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola lembaga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki integritas tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima

- b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan di Jawa Tengah melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

- c. Meningkatkan panganekaragaman dan mutu pangan

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan melalui peningkatan penganekaragaman dan mutu pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

3. Tujuan

Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.
Tujuan : meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran.
- b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.
 1. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan.
 2. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di seluruh rumah tangga.
 3. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana.
 4. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
 5. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.
 6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.
- c. Meningkatkan penganekaragaman dan mutu pangan
Tujuan :
 1. Meningkatkan penganekaragaman melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
 2. Mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

4. Sasaran

Untuk mencapai tujuan, dirumuskan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran.
- b. Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan.
- c. Tercapainya ketersediaan pangan utama.
- d. Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
- e. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah.
- f. Tercapainya penanganan daerah rawan pangan.
- g. Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.
- h. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat.
- i. Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan.

Bab 7
Penutup

Ringkasan dari Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.

Kode	Uraian	Debet	Kredit
1.	ASET	22.227.586.525	0,00
3.	EKUITAS DANA	0,00	10.776.584.019,51
4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	44.862.200
5.	BELANJA DAERAH	32.403.529.270	0,00
	TOTAL	54.531.115.795	10.821.446.219,51

Aset Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.22.227.586.525 dengan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah Rp.32.403.529.270 dan Pendapatan Daerah berasal dari penerimaan lain-lain sebesar Rp. 44.862.200